

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku;

- Aartje Tehupeiory, *Bahan Ajar Asas-Asas Hukum Agraria*, 2023, UKI Press, Jakarta
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Edited by Djambatan. Edisi Revi., 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Edited by Djambatan, 2008.
- Harsono.B. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, 2002.
- Haar, B Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Edited by Pradnya Paramita. jakarta, 1981.
- Hadjon, P. M. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.” 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. yogyakarta, 2024.
- H. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, 1987.
- Maria S.W. Sumardjono. *Hukum Adat Dan Pembangunan*, n.d.
- Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. jakarta: Kompas, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Pa. jakarta, 1983.
- Napitupulu, Diana R. W. *Hukum Pertanahan*. jakarta: UKI press, 2022.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. surabaya, 1987.
- Raharjo, M. *Memahami Amdal Edisi 2*. Edited by Graha Ilmu. Yogyakarta, 2014.
- Rawls, Jhon. *Teori Keadilan, Terjemahan Oleh Uzair Fauzan Dan Nurhadi*.

- yogyakarta, 2006.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. Edited by Universita Atma jaya. yogyakarta, 246AD.
- Rato, Dominikus. *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, LakBang Pressindo. Yogyakarta, 2016.
- R.W.Diana,Napitulu. *Pendaftaran Tanah Persertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*. Jakarta.: UKI press, 2022.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*. UNDP Regio. Jakarta, 2006.
- Soedjatmoko. *Pembangunan Manusia Dan Budaya Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. jakarta, 2012.
- S.Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta, 1989.
- Soepomo. *Hukum Adat Indonesia*. Edited by Pradnya Paramita. Baru., 2005.
- Suliatiani, Siska Lis. *Hukum Adat Indonesia*. Sinar graf. jakarta, 2021.
- Sumardjono, Maria SW. *Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum*. Kompas. jakarta, 2010.
- Swasono, Sri-Edi. *“Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Indonesia.”* Edited by Kompas, 2015.
- Santosa, A. *Pancasila Dan Pembangunan Kota Humanis: Telaah Filosofis Pembangunan IKN*. Edited by UGM Press. Yogyakarta, 2024.
- Santosa, A. “Kompensasi Non-Ekonomi Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Adat.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, 521–539.
- Santoso, M. Agus. *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. jakarta, 2014.
- Simangunsong, A. F. *Mengkritisi Hukum Pengadaan Tanah & Penilaian Ganti Kerugian Era UU Cipta Kerja*. Jakarta.
- Tehupeiory, Aarce. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Repository.Upy.Ac.Id, 2016. <https://repository.pertanian.go.id/items/84e82781-2ca4-4d63-a0ab-5234bdc7246c>.
- Tehupeiory, Aarce. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: raih asa sukser, 2017.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

B. Undang-Undang;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Keputusan Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-924/2019.

C. Jurnal;

Adib, Mochamad, and Ahmad Siddiq. "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6," n.d., 63–76.

Alting, Husen. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta, 2010.

Aman. "Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara," n.d.

- Aman, M. "Konflik Agraria Dan Disintegrasi Sosial Di Kalimantan Timur." *Jurnal Antropologi Indonesia* Oleh, 2023.
- Andini, P. "Perubahan Status Tanah Komunal Menjadi Milik Negara Di IKN." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 182, no. 2 (n.d.): 102–19.
- Anggoro, D. "Konflik Agraria Di Kalimantan Timur: Studi Kasus Kutai Barat Dan Kutai Kartanegara. Dalam Prosiding Seminar Nasional Antropologi Indonesia," 2018, 340–50.
- Arenawati. *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Konsep Dan Penatalaksanaan Di Indonesia*. Edisi 2. Yogyakarta, 2016.
- Arizona, Y. "Pluralisme Hukum Dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 352–373 (2016).
- Arso, Dimas Dwi. "Asosiasi Pengajar Hukum Adat (Apha) Indonesia." *Journal of Indonesian Adat Law (Jial)* 2, no. 1 (2018): 68–69. <https://jial-apha.or.id/index.php/journals/article/view/Perkawinan-pewarisan-masyarakat-Rejang/15>.
- Artana, Wayan, A. Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. "Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pt. Bali Pecatu Graha." *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021)*: 666 2 (2021).
- Balak, P. "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Arma Dan Watmuri Kabupaten Maluku Tenggara Barat." *Skripsi*, 2016, 2. <https://repository.unair.ac.id/39759/>.
- Cahyaningrum, Dian. "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi," 2022, 21–39.
- Damanhuri Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls," n.d. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.
- Dewi, S. "Risiko Sosial Pembangunan IKN Terhadap Masyarakat Adat Lokal. Jurnal Sosiologi Indonesia,," *Jurnal Sosiologi Indonesia* 10, no. 2 (2024): 134–51.
- Djasmani, H. Y. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 374," 2011, 365–374.

- Dr.H.Darmadi Djufri,S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Terbukti Tidak Bersalah*. puworkerto, 2023.
- Dwi Herlambanng. “KPA: Lahan IKN Nusantara Tak Seluruhnya Milik Negara.” *validnews.id*, 2022. <https://validnews.id/nasional/kpa-lahan-ikn-nusantara-tak-seluruhnya-milik-negara>.
- Fatmi, Siti Raga. “Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik” 5, no. 3 (2018).
- Haba, J. “Revitalisasi Hak Ulayat Di Era Modernisasi Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*” 22, no. 1 (2020): 45–63.
- Haboddin, M. “Demokrasi Dan Konflik Agraria Di Indonesia: Dominasi Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2011, 25–40.
- Haq, Andi Saiful, Azhari Azis Samudra, Evi Satispi, and Universitas Muhammadiyah Jakarta. “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Andi Saiful Haq 1* , Azhari Azis Samudra 2 , Evi Satispi 3 , Andriansyah 4” 8090 (2025). <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.40844>.
- Irawan, M. A. “Konflik Agraria Dalam Pembangunan IKN: Analisis Sosio-Legal Di Kalimantan Timur.” *Jurnal Bhumi* 9, no. 2 (2023): 145–65.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM” 01 (n.d.): 13–22.
- Kinseng, R. A., & Satria, A. “Adat, Tanah, Dan Kekuasaan Di Kalimantan Timur: Kajian Sosiologis Hak Ulayat Dayak. *Jurnal Antropologi*.” *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43, no. 3 (2021): 201–220.
- Kusnardi, Moh. Ibrahim, H. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PSHTN FH UI dan Sinar Bakti., n.d.
- Lisnawati. “MIDDLE INCOME TRAP : STRATEGI INDONESIA DAN BELAJAR” XVI, no. 19 (2024).
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-19-I-P3DI-Oktober-2024-246.pdf#:~:text=Direktur Eksekutif Center of Reform

- on Economic, penghasilan menengah alias sulit maju (Hasan%2C 2022).
- Margaretha Dwi Yani 1*, Yenny Yuniawaty 2. “Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Suku Balik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara” 7, no. 3 (2025).
- Mulyata, Jaka. *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. surakarta, 2015.
- Mutolib, A., Kadir, S., & Nasrul, H. “Konflik Agraria Di Indonesia: Pola Dan Solusi Penyelesaiannya.” *Jurnal Analisis Kebijakan* 13, no. 2 (2025): 121–36. <https://doi.org/10.21082/akp.v13n2.2015.121-136>.
- Nasution, A. “Proses Pendaftaran Tanah Ulayat Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 2018, 1–15.
- Nugroho, Y. “Human-Centered Smart City Development: Lessons for IKN.” 14(2).” *Journal of Urban Policy Studies*, 2022, 101–18.
- Nurhadi, H. “Kolonialisme Dan Transformasi Hak Atas Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 14, no. 2 (2020): 77–94.
- Nova Elena¹, Chris Anggi Natalia², Aartje Tehupeiory³, I Dewa Ayu Widyani⁴. “ANALISIS YURIDIS LEGALITAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI PULAU REMPANG, KEPULAUAN RIAU” 10, no. 3 (2024): 620–34.lis
- Prasetyo, Agung Basuki. “HAK ULAYAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL (Suatu Kajian Yuridis Empiris),” 2007, 151.
- Prasetyo, D. “Negosiasi Hak Ulayat Dan Kompensasi Dalam Pembangunan IKN.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan Sosial* 6, no. 2 (2024): 99–118.
- Sari, N., & Mulyadi, H. “Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Sosialisasi Proyek Strategis Nasional Di Kalimantan.” *Jurnal Pembangunan Daerah* 7, no. 2 (2022): 203–20.
- Sari, R. D. “Hak Ulayat Dan Keberlanjutan Lingkungan Di Wilayah Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Ilmu Lingkungan Indonesia*, 25, no. 2 (2023): 115–30.
- . “Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Di Wilayah Ibu Kota Negara

‘Nusantara.’” *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6504>.

Sirait, M. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2017, 140–52.

Sitabuana, Tundjung Herning & Dixon Sanjaya. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat,” 2021, 171–82.

Thontowi, J. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak Hak Tradisionalnya.” *Pandecta*, 2015, 1–13.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/4190>.

Tehupeiory, Aartje. “Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Tanah Adat.” *Journal of Indonesian Adat Law(JIAL)* 2 (2018).
<http://repository.uki.ac.id/275/>.

Wibowo, A., & Supriyadi, D. “Kedudukan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional Pasca Reforma Agraria.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 285–304.

Yusuf, M. A. *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*. Prosiding., 2018. <https://adoc.pub/kepastian-hukum-hak-masyarakat-hukum-adat-atas-tanah-dan-sum.html>.

D. Internet;

(AMAN):, Laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. “Dampak IKN Terhadap Masyarakat Adat,” n.d. <https://aman.or.id/>.

ATR/BPN. “Prosedur Legalisasi Pelepasan Hak Ulayat Di Kawasan IKN.” Kementerian ATR/BPN, 2023.

(KPA):, Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria. “Catatan Konflik Agraria 2017-2022,” n.d.

(OIKN), Otorita Ibu Kota Nusantara. “Pedoman Verifikasi Dan Validasi Hak Ulayat Di Kawasan IKN.,” 2023.

(WALHI):, Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. “Konflik Agraria Di IKN.” Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI):, n.d.

<https://www.walhi.or.id/>.

Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalimantan Barat. “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara.” Accessed January 10, 2026.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>.

tirto.id. “Isi Pasal 29 Ayat 1 Dan 2 UUD 1945 Beserta Maknanya,” n.d. <https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama-dan-maknanya-glPa>.

“<https://kbbi.web.id/perindungan>, Diakses Pada Tanggal 02 November 2025 Pukul 16.50 WIB,” n.d.

Hukumonline. “Perlindungan HAM Dalam Pasal 28A Sampai 28J UUD 1945,” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ayatBABA-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>.

IKN., Badan Otorita. “Visi Dan Misi Pembangunan Ibu Kota Nusantara 2045,” 2023.

Kementerian PPN/ bappenas. “Kementerian Perencanaan Pembangunan” kementerian dalam negeri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,” n.d. <https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view?id=720>.

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,” 2021.

Kementerian PUPR. *Konsep Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara*. Edited by Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta, 2023.

Muhammad alfathir. “Pasal 28 Dalam UUD 1945 Lengkap Dengan Isi Dan Maknanya.” detik.edu, n.d. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7672762/pasal-28-dalam-uud-1945-lengkap-dengan-isi-dan-maknanya>.

OIKN. “Masterplan Ibu Kota Nusantara 2022–2045.” Otorita IKN, 2023.

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” Undang-Undang No.5 Tahun 1960, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

Post, Kaltim. “Beberapa Suku Dayak Setujui Pelepasan Parsial Hak Ulayat Di Wilayah IKN.,” 2023.

Badan Otorita IKN. “IKN Smart City Blueprint 2023–2045.,” 2023.

Rambitan, Angelina. “Bunyi Pasal 27 Sampai 34 Beserta Ayatnya,” n.d.
<https://www.scribd.com/document/423584676/Bunyi-Pasal-27-Sampai-34-Beserta-Ayatnya>.

Tirto.id. “Isi Pasal 30 UUD 1945: Bunyi Ayat Sebelum Dan Setelah Amendemen,” n.d. <https://tirto.id/isi-pasal-30-uud-1945-bunyi-ayat-sebelum-dan-setelah-amandemen-glPq>.

LIPI. *Ekosistem Inovasi Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Penguatan*. Edited by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta, 2021.

